

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa  
Tengah)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

**Oleh :**

**NOVIA ANINDA LATIFAH**

**B 200 140 172**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH  
(Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**NOVIA ANINDA LATIFAH**

**B 200 140 172**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si**

**NIDN. 0605086301**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)**

Yang ditulis oleh:

**NOVIA ANINDA LATIFAH**  
**B 200 140 172**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada hari Selasa, 25 Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan penguji:

1. **Drs. Suyatmin W.A., M.Si**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Andy DBB, S.E, M.Si, Ph.D.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Fatchan Achyani, S.E, M.Si.**  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
  
**Dr. Syamsudin, M.M**  
**NIDN. 017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Februari 2020

Penulis



**NOVIA ANINDA LATIFAH**  
**B 200 140 172**

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Obyek penelitian dilakukan pada 15(lima belas) Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan jumlah responden yang telah ditentukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara dan 1(satu) Staf Keuangan. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 45 responden, namun karena ada 4(empat) data yang rusak, maka hanya 41 data yang bisa diolah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis, Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Nilai koefisien determinasi sebesar 38,6%, artinya variable Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variable Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 38,6%, sedangkan sisanya yaitu 61,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

**Kata Kunci :** sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

**Abstract**

This research aims to analyse the influence of human resources, Internal control system and utilization of information technology to the quality of financial report, object of research conducted in 15 (fifteen) office in the Government Boyolali District with the number of respondents who have been determined by the purposive sampling method, namely Kasubag Financial, Treasurer and 1 (one) Finance staff. Method of collecting data by spreading the questionnaire to 45 respondents, but because there are 4 (four) data damaged, then only 41 data can be processed. The analytical methods used are multiple linear regression with data quality tests, classical Asusmsi test and hypothesis testing, based on the results of the research can be concluded that the human resources and utilization of information technology variables have no effect The quality of financial statements, while the Internal control system variables affect the quality of financial statements. The value of the coefficient of determination is 38.6%, meaning that the variable quality of financial statements can be explained by the

human resources, Internal control system and information technology utilization of 38.6%, the remainder is 61.4% Other factors outside the investigated model.

**Keywords:** human resources, internal control system, utilization of information technology to the quality of financial statements

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).

Seiring Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas, Dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 tentang

SAP bahwa laporan keuangan berkualitas itu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Sari Nilam, 2016).

Menurut Nurillah (2014), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, et al., 2014).

Menurut Alamsyah et al (2017) Kinerja sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Putri et al, 2015).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Yeny et al (2016), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas

dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya manusia tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati, et al., 2014).

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang baik dan tepat, dibutuhkan suatu analisa dan evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan. Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran A paragraf 84 menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penaksiran resiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) Pemantauan. Menurut Putri et al (2015) Agar struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian internal sehingga akan mendorong terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian internal yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan (Putri et al, 2015).

Maka menurut Setyowati et al (2016) Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga

negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas peting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan system pengendalian intern (Setyowati et al, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negaradan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP No. 60/2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur system pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan penguatan system pengendalian internal. (Nagor et al, 2015).

Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Udiyanti et al, 2014).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya

pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Sehingga, teknologi informasi dapat membantu para penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang baik serta mengumpulkan dokumen-dokumen untuk membuat laporan keuangan tersebut. Menurut Sutabri (2014:4), terdapat tiga komponen utama teknologi informasi, yaitu: Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), dan Orang (*Brainware*). Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di mana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Alamsyah, et al., 2017).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Thompson, Higgins, Howell (1991), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang di dapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. 1. Bagian

akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. 2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja. 3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. 4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. 6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. 7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya (Yeny, et al., 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Desintha et al (2017) yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan mengganti 2 variable Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan menambah satu variable independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Karena kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dan efisien maka diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.(Alamsyah, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)”

## **2. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dimana analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13). Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada 15 Dinas yang ada di Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada Dinas Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)

Penelitian ini digolongkan penelitian Kuantitatif. Data yang berhubungan dengan variabel penelitian, dikumpulkan dari instansi dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali, sedangkan teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel penelitian adalah *purposive sampling*, karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi / tata usaha keuangan pada dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden pada setiap dinas. Dari beberapa dinas akan diambil responden dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan. Adapun proses penyebaran kuesioner dan penentuan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1. dan tabel 2.

Tabel 1. Penyebaran kuesioner

| No              | Nama Dinas                                                                                    | Keterangan | Jumlah |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1               | Dinas Ketahanan Pangan                                                                        | Bersedia   | 3      |
| 2               | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bersedia   | 3      |
| 3               | Dinas Peternakan dan Perikanan                                                                | Bersedia   | 3      |
| 4               | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                              | Bersedia   | 3      |
| 5               | Dinas Perhubungan                                                                             | Bersedia   | 3      |
| 6               | Dinas Pertanian                                                                               | Bersedia   | 3      |
| 7               | Dinas Lingkungan Hidup                                                                        | Bersedia   | 3      |
| 8               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                               | Bersedia   | 3      |
| 9               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                       | Bersedia   | 3      |
| 10              | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                         | Bersedia   | 3      |
| 11              | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata                                                        | Bersedia   | 3      |
| 12              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | Bersedia   | 3      |
| 13              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu                                                   | Bersedia   | 3      |
| 14              | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              | Bersedia   | 3      |
| 15              | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja                                                               | Bersedia   | 3      |
| Total Kuesioner |                                                                                               |            | 45     |

Sumber: Data Primer diolah 2020.

Berdasarkan pada tabel 1. di atas peneliti menyebar kuesioner kepada pegawai bagian keuangan dari 15 dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 45 kuesioner karena tidak semua dinas dijadikan responden dengan alasan respon dari dinas yang tidak bersedia dan mengikuti penelitian terdahulu yang hanya mengambil beberapa dinas saja.

Tabel 2. Pengambilan sampel

| No | Keterangan                                                                   | Jumlah |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah Kuesioner yang disebar pada 15 dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali | 45     |
|    | Tidak sesuai kriteria:                                                       |        |
| 2. | Kuesioner rusak                                                              | (4)    |
| 3. | Jumlah kuesioner yang sesuai kriteria                                        | 41     |
|    | Total kuesioner yang sesuai kriteria                                         | 41     |
|    | Total sampel siap olah                                                       | 41     |
|    | Data outlier                                                                 | (0)    |
|    | Total sampel bersih                                                          | 41     |
|    | <i>Respon Rate</i> : $41/45 \times 100\%$                                    | 91,11% |

Sumber: Data Primer diolah 2020

Berdasarkan pada tabel 2. di atas peneliti menyebar kuesioner kepada pegawai bagian keuangan dengan kriteria kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan pada 15 dinas di Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 45 kuesioner, semua kuesioner kembali dan diisi lengkap, namun setelah dilakukan penyeleksian kuesioner ada kuesioner yang rusak dan tidak dapat digunakan sebanyak 4 kuesioner, sehingga total kuesioner yang sesuai kriteria sebanyak 41 kuesioner.

Penelitian ini menggunakan karakteristik responden yang meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Tabel 3. Karakteristik responden Berdasarkan jenis kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| Laki-laki     | 19     | 46,3%      |
| Perempuan     | 22     | 53,6%      |
| Jumlah        | 41     | 100%       |

Sumber : Data diolah 2020.

Berdasarkan tabel 3. diketahui bahwa rata-rata responden memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 53,6% dan laki-laki sebanyak 19 orang dengan persentase sebesar 46,3% .

Hasil Uji Hipotesis 1 (Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa variabel sumber daya manusia mempunyai nilai  $t_{hitung}$  (.148) lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  (1,687) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $.884 > \alpha = 0,05$ , oleh karena itu,  $H_1$  tidak terdukung secara statistik, sehingga sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, ketidaksignifikanan ini disebabkan kompetensi SDM di sub bagian akuntansi belum mendukung. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi yang ada di Kabupaten Boyolali belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan

dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yeny *et al* (2016), yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismi Desintha Putri *et al* (2017) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Hipotesis 2 (Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa variabel sistem pengendalian internal yang mempunyai nilai  $t_{hitung}$  (3.207) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (1,687) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $.003 < \alpha = 0,05$ , oleh karena itu, **H2** terdukung secara statistik sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil pengujian hipotesis dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern telah terlaksana dengan baik di pemerintah kabupaten bengkalis. Semakin tinggi sistem pengendalian intern pemerintah daerah, semakin andal pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dengan sisitem pengendalian iternal yang baik juga dapat mendeteksi kecurangan / ketidakakuratan dalam proses akuntansi sehingga mendorong efisiensi dan taat terhadap peraturan perundang undangan. Karena dalam sistem pengendalian intern memiliki 3 fungsi penting yaitu: pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizki Agus P (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yuliani *et al* (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Hipotesis 3 (Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa Dari hasil tabel IV.17 tersebut juga dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pengendalian intern yang mempunyai nilai  $t_{hitung}$  (1.429) lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  (1,687) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi  $.161 > \alpha = 0,05$ , oleh karena itu, **H3** tidak terdukung secara statistik sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena, di Kabupaten Boyolali pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan komputer, *software* / perangkat lunak dan lainnya yang sejenis belum digunakan secara optimal. Apabila teknologi informasi yang ada pada dinas belum digunakan secara optimal terutama untuk penyusunan laporan keuangan daerah, penerapan teknologi informasi bisa menghambat pekerjaan bagian keuangan atau akuntansi, karena pemanfaatan teknologi informasi jika digunakan secara optimal dapat memberikan peningkatan keandalan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riandani (2017) dan Aini (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Azlan *et al* (2015) dan Karmila *et al* (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hipotesis pertama (H1) ditolak, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hipotesis kedua (H2) diterima, Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut : Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas objek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih bisa mewakili secara keseluruhan atau dapat tergeneralisasi, Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan supaya dalam mengumpulkan data tidak hanya menggunakan metode kuesioner, namun juga bisa dengan menggunakan observasi langsung, sehingga bisa memperkecil adanya bias data, Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan supaya menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah M Rifky, Rahayu Sri, Muslih M. 2017. *Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok)*. Vol 15 No. 2.
- Ghozali Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 5. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sari Nilam. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo)*. Vol 3 No. 1.

- Setyowati Lilis, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*. Volume 20 No. 2.
- Sudiarianti Ni Made, Ulupui I Gusti K. A, Budiasih I. G. A. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wijayanti Lilis. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yeny, Karamoy Herman, Poputra Agus T. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama*. ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA. Vol 4 No. 3.
- Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap GOOD GOVERNANCE Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan*. ISSN 2302-0164 Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Volume 5 No. 2.